

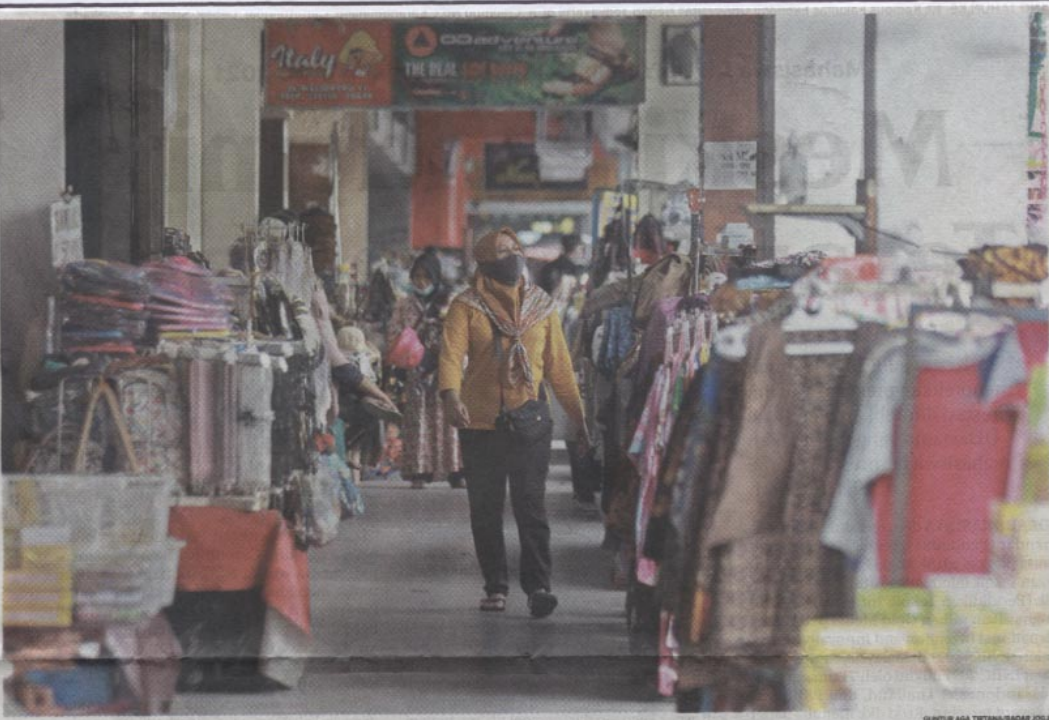


Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Juni 2021

Halaman: 1



BATASI OPERASIONAL: Seorang pedagang kaki lima melintas di antara lapak-lapak cinderamata di kawasan Malioboro, Jogja, kemarin (21/6). Pemkot Jogja berencana kembali membatasi jam operasional pelaku usaha di kawasan Malioboro. Mereka diminta tidak berjualan di atas pukul 21.00 sebagai upaya menekan persebaran Covid-19.

PKL Sepakat Tutup Aktivitas Pukul 21.00

UNTUK mengkonduksikan perkembangan Covid-19, Pemkot Jogja berencana melanjutkan pembatasan seluruh aktivitas sampai pukul 21.00. Menanggapi hal ini, seluruh pedagang kaki lima (PKL) berkomitmen melaksanakan intruksi dari pemerintah itu.

IN SIGHT

Ketua Koperasi Paguyuban PKL Tridharma Rudiarto mengatakan, akan menyesuaikan intruksi dari pemerintah yaitu menutup aktivitas berjualan hingga pukul 21.00. PKL rata-rata beraktivitas masih sampai pukul 22.00-23.00, ini karena kondisi Malioboro sudah cukup menggeliat sehingga menutup aktivitas tergantung dari jumlah kunjungan wisatawan. ▶ *Baca Batasi... Hal 3*

Wak Lanjut

1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
---------	----------------------------------	--------------------------------------	---

PKL Sepakat Tutup Aktivitas Pukul 21.00

Sambungan dari hal 1

"Kami menyesuaikan, artinya aktivitas seperti biasa tapi proses diperketat. Kayaknya kalau memang ini diintruksikan tutup pukul 21.00, ya kami laksanakan," kata Rudiarto kemarin (21/6).

Ia menjelaskan sebelum Lebaran kemarin PKL membatasi aktivitas berjalan hingga pukul 21.00. Ini karena memang tidak ada pengunjung sama sekali. Kondisi Malioboro tergantung kepada kunjungan jumlah pengunjung atau wisatawan. Ketika kunjungan berkurang tentu aktivitas para PKL akan lebih awal tutupnya.

Terlebih pada akhir pekan kemarin kunjungan Malioboro mengalami peningkatan. Hal ini karena imbas dari penutupan sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Bantul. Wisatawan akhirnya mengalihkan kunjungannya ke destinasi yang tidak ditutup, termasuk Malioboro. "Kami intruksikan untuk waspada dan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat, supaya bisa mencegah paparan sehingga ekonomi bisa jalan," ujarnya.

Namun demikian dikatakan yang lebih harus diperketat adalah proses Covid-19, bukan pembatasan jam operasional yang bakal memberi dampak kepada pelaku usaha di kawasan Malioboro. Menurutnya, mobilitas hanya salah satu yang mempengaruhi peningkatan kasus. Tetapi yang lebih pokok adalah pembatasan. Ternyata sejauh ini tidak mengurangi kasus justru semakin bertambah.

Tanpa mobilitas ketika proses diabaikan tentu bisa tertular. Tapi bagaimana pun juga mobilitas ada, perekonomian berjalan tapi proses betul dilaksanakan *insya Allah* nggak akan terpapar," tandasnya.

Oleh sebab itu, penerapan proses ketat mutlak harus dijalankan di sepanjang Malioboro. Anggotanya

pun wajib mematuhi penerapan proses. Di setiap lapak sudah disediakan *hand sanitizer* dan pedagang selalu memakai masker, serta menjaga jarak. "Kami selalu mengedepankan bagaimana pelayanan ke konsumen tetap taat proses," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator PPMAY KRT Karyanto Purbo-Husodo menambahkan, selama ini toko-toko 90 persen sudah tutup operasional sebelum pukul 21.00. Ini memang komitmen bersama untuk mencegah sebaran virus korona, sehingga semua anggota harus sudah tutup pukul 21.00, baik PKL maupun lesehan.

Namun, PKL tutupnya masih di atas pukul 21.00. "Kita tunggu intruksi atau SE Wali Kota Jogja. Kami berkomitmen mematuhi peraturan pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi meminta untuk pengawasan jam buka tutup seluruh aktivitas sesuai Intruksi Wali Kota, Intruksi Gubernur maupun Intruksi Mendagri bahwa jam tutup seluruh aktivitas sampai pukul 21.00. "Ini akan kita teruskan supaya perkembangan Covid-19 kondusif," ujarnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto mengatakan, hasil pengawasan proses secara acak di tempat-tempat parkir wisata dan destinasi wisata pada akhir pekan kemarin terdapat empat bus membawa kelengkapan dokumen kesehatan. Sehingga tidak dihalau untuk putar balik.

Hanya, masih ditemui beberapa orang tidak memakai masker dan langsung diedukasi di tempat. "Sama yang di lokasi wisata juga kami edukasi untuk tetap memenuhi proses, terutama masker agar selalu tetap dipakai," katanya.

Terkait jam buka operasional restoran, kafe dan usaha lainnya juga diupayakan pengawasan

untuk tertib menutup aktivitasnya sesuai ketentuan PPKM mikro.

Pemkab Kaji Penutupan Obwis Sabtu-Minggu

Pemkab Bantul akan mengkaji ulang atau evaluasi terhadap Instruksi Bupati Bantul No 15/Instr/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan PPKM Berbasis Mikro untuk Pengendalian Persebaran Covid-19. Terkait dampak dan efektivitas Inbup dalam menekan penularan Covid-19.

Salah satu kebijakan yang diatur dalam Inbup adalah menutup seluruh objek wisata (obwis) yang dikelola pemkab setiap Sabtu dan Minggu. Kebijakan itu efektif sejak 15 Juni sampai 28 Juni.

Jadi tindak lanjut dari Inbup itu akan kami putuskan setelah berkoordinasi dengan Pemprov DIY, Apapun pariwisata di DIY ini merupakan kesatuan wilayah kawasan wisata, maka akan diambil keseragaman kebijakan," beber Bupati Bantul Abdul Halim Muslih kepada wartawan Minggu malam (20/6).

Diungkapkan, seluruh bupati se-DIY bersama Gubernur Hamengku Buwono X melaksanakan rapat koordinasi di Kepatihan membahas lonjakan Covid-19. Inbup Bantul turut dibahas dalam rapat dan dievaluasi. Terkait dampak dan efektivitas Inbup Bantul dalam menekan persebaran Covid-19 dengan ditutupnya obwis Sabtu dan Minggu. "Pemkab Bantul tetap memantau situasi dan kondisi di lapangan, tentu akan dilakukan pencermatan," ujarnya.

Jika hasil rapat koordinasi memutuskan pariwisata kembali dibuka, akan dilakukan pengawasan ekstra ketat terhadap pengunjung dan tempat wisata. Termasuk resto atau warung kuliner di tempat wisata.

"Kami tidak ingin angka Covid-19 di Bantul terus menanjak. Maka kami tentu akan

mengerahkan petugas untuk melakukan pengawasan di obwis terkait protokol kesehatan (proses)," ucapnya.

Penerapan proses dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pembatasan jumlah kunjungan terhadap warung kuliner. Sehingga diharapkan ada komitmen saling mendukung agar ekonomi berjalan tapi kesehatan tetap terjaga.

"Kami mendengarkan aspirasi pelaku ekonomi pariwisata dan akan mengambil kebijakan yang terbaik. Tapi tentu harus menunggu hasil rapat koordinasi yang akan dipimpin langsung oleh gubernur," katanya.

Sebelumnya, perwakilan paguyuban warung kuliner di Pantai Depok, Nunik mengeluh. Ia dan sekitar 30 pemilik warung kuliner lainnya merugi jutaan rupiah, akibat penerapan Inbup Bantul yang mendadak dan tanpa sosialisasi.

Petugas berjaga di tempat pemungutan retribusi (TPR) dan jalan menuju pantai guna menghalau pengunjung. Tapi, pelaku kuliner tetap membuka warungnya guna mencoba peruntungan. "Kami tetap buka. Kalau ada satu dua orang yang mau makan. Tetap kami layani, *wong* ikan itu gizi *kok*," cetusnya.

Dijelaskan, para pemilik warung kuliner sudah melakukan persiapan dengan membeli ikan sejak Kamis (18/6). Tiap pemilik warung minimal membeli ikan sebanyak 300 kilogram, dengan harga sekitar Rp 25 ribu per kilogram.

Sementara untuk cumi dan udang mereka membeli dengan harga Rp 75 ribu per kilogram. Selain itu, pedagang juga membeli kelapa muda minimal 20 butir. "Silakan hitung sendiri kerugian kami. Jadi sebelumnya warga setempat nggak ada yang dikasih informasi, tahu-tahu di TPR ada Satpol PP dan polisi. Ya pedagang semua rugi," ucap Nunik. (wia/fat/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005